

**KEBIJAKAN JEPANG DALAM MERESPON ANCAMAN MISIL KOREA UTAR
A
PADA TAHUN 2012-2017**

Oleh : Anggal Detry Natalia Sitohang
Supervisor: Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si
Bibliography :18 Journals, 15 Books, 14 Websites
Internasional Relation Department
Faculty of Social and Political Science
University of Riau
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

This research explains about Japan and North Korea have unstable relation caused by history aspect. This thing was caused every country try to strengthen their security. Japan increased and kept its security with using Missile Air Defense. The enhancement analogously with increasing of device and fund of Japan military. This research will examine Japan Policy in Facing the Threat of North Korea Missile in 2012-2017.

The method that used in this research is qualitative method with data source from library research. The theory is defensive neo-realism by Kenneth Waltz, that is for focusing how anarchy world can influence countries to increase the capability of their country. The concept is security dilemma by John Herz.

This research shows that North Korea had done nuclear experiment that had crossed over the sea of Japan. This experiment had been done at the number of five times and the last one at 2017. This is the reason of Japan to increase the Missile Air Defense, that is to have strong security on threatening from North Korea. So, Japan can achieve prosperity and do activities normally as a country.

Keywords: Missile Air Defense, Threat , Defensive Neo-realism, Security Dilemma.

PENDAHULUAN

Sejarah pada masa pendudukan Jepang di Korea dimulai secara resmi pada tanggal 22 Agustus 1910 saat Perdana Menteri Yi Wan-Yong menandatangani perjanjian pendudukan dengan Jepang. Dalam perjanjian ini kemudian diumumkan kepada seluruh rakyat Korea oleh Raja Sunjong pada tanggal 29 Agustus 1910. Selama masa kependudukannya, Jepang menguasai kehidupan ekonomi, politik, dan militer bangsa Korea. Untuk menjalankan penjajahannya terhadap bangsa Korea, Jepang memilih untuk memerintah Korea secara langsung.¹

Tercapainya kedua perjanjian itu kemudian ditindak lanjuti Jepang dengan mendirikan karesidenan jendral pada tahun 1906 yang dimaksudkan untuk mempermudah Jepang dalam melakukan intervensi terhadap segala urusan intern Korea dan mengangkat Ito Hirabumi sebagai residen jendral pertama imperialis Jepang di Semenanjung Korea. Perampasan hak kedaulatan bangsa Korea dilakukan oleh Jepang tanpa memikirkan sama sekali posisi bangsa Korea. Kedua perjanjian itupun ditandatangani oleh para birokrat Korea dibawah ancaman dan paksaan kaum imperialis Jepang. Jepang juga tidak segan-segan untuk meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea agar pemerintah Korea mau menuruti keinginan Jepang.²

Pasca Perang Dunia II yang ditandai dengan kekalahan Jepang, Korea telah jatuh ke tangan Amerika Serikat, Uni Soviet dan RRT. Ketiga negara tersebut adalah negara kuat yang mempunyai pengaruh dan peranan yang cukup besar di dunia, karena negara-negara di dunia pada saat itu mempunyai ketergantungan pada mereka, khususnya kekuatan militer.

¹ Yang Seung-Yoon & Nur Aini Setiawati, *Sejarah Korea Sejak Awal Abad hingga Masa Kontemporer*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003.

² *Ibid.*

Dengan adanya perang Korea, PBB ikut campur tangan dengan keikutsertaannya melibatkan anggotanya untuk menyelesaikan masalah Korea.³

Hubungan Politik luar negeri antar negara Korea Selatan dan Jepang menjadi tidak stabil disebabkan oleh aspek sejarah. Sejak Jepang menduduki Korea Selatan selama kurun Perang Dunia II tersebut, ternyata masih banyak dosa perang yang dilakukan pemerintah Jepang, yang membuat tidak harmonisnya hubungan politik luar negeri Jepang dan Korea Selatan di masa depan.⁴

Pada wilayah Asia Timur sejak lama penuh dengan dinamika mengenai hubungan antar negara didalamnya. Pada kawasan ini negara Tiongkok memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, dan bukan itu saja, perkembangan ekonominya pun sangat maju, kemudian negara Jepang dengan keunggulan teknologinya, Korea Utara dengan kekuatan nuklirnya, serta Taiwan dengan ketegasan untuk tetap berdiri sendiri sebagai sebuah negara bebas.⁵

Secara sederhana Keamanan nasional dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Terdapat kecenderungan bahwa suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting, jika dapat menghindari perang atau

³ Leo Agung. *Sejarah Asia Timur*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012.

⁴ Hariska Farida dkk. "Dosa masa lalu, Jepang minta maaf ke Korsel", 2010. <http://www.vivanews.co.id/news/read/170165> Diakses pada 28 maret 2019

⁵ Dick.Nanto, Dick and Emma Chanlett-Avery. *The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan and South Korea : U.S. Policy Choices*, Congressional Research Service, The Library Congress, 2006.

terpaksa melakukannya, negara tersebut akan berusaha untuk dapat keluar sebagai pemenang.⁶

Keadaan yang dapat membahayakan keamanan nasional merupakan perpaduan dari ancaman dan kerawanan yang sangat erat kaitannya dengan keamanan nasional maupun internasional. Suatu hal yang dapat dilakukan oleh suatu negara ialah membuat kebijakan keamanan nasional yang berfokus pada negara itu sendiri, sekaligus dengan tidak melupakan kebijakan luar negeri untuk mengurangi ancaman dari luar.⁷

Keamanan nasional pada negara Asia Timur tidak dalam kondisi yang aman, dimana kondisi keamanan di Asia Timur dipengaruhi oleh konflik Korea Utara yang memiliki nuklir dan mengancam keamanan nasional negara-negara lain, bukan hanya Korea Selatan yang merupakan lawan Korea Utara namun juga memengaruhi keamanan Jepang. Hal ini disebabkan karena Korea Utara memiliki nuklir yang daya jangkauan mencapai wilayah Jepang.

Konflik ini memang sempat berada dalam kondisi gencatan senjata, namun konflik ini kembali lagi pada 10 Agustus 2011, saat Korea Selatan dengan Amerika Serikat melakukan latihan militer bersama. Latihan militer tersebut diduga sengaja memancing suasana panas kedua Korea, Korea Utara menembakkan tiga artileri ke arah perbatasan utara Korea Selatan di Laut Kuning.⁸

Dalam konflik ini, Korea Utara me

⁶ Darmono, dkk. *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*, Jakarta : Dewan Ketahanan Nasional, 2010.

⁷ Bahjatul Murtasidin, 31163-ID-perubahan-kebijakan-luar-negeri-kanada-terhadap-iran-pada-masa-pemerintahan-step.pdf, Hal. 7. Diakses pada 18 maret 2018.

⁸ Jordy C. Virya, *Kronologi Konflik Korea Selatan dan Korea Utara*, <https://www.academia.edu/11228745/> diakses pada 20 maret 2018.

lakukan uji coba nuklir, hal ini dilakukan baik sebagai murni untuk persiapan peran dan juga sebagai *deterrence power*. Korea Utara sukses melakukan uji coba Intercontinental ballistic missile atau rudal balistik antar benua (ICBM). Langkah itu mereka gambarkan sebagai "peringatan keras" untuk Amerika Serikat. Korea Utara kembali meluncurkan rudal yang melintasi wilayah udara Jepang. Rudal tersebut berhasil mengudara sejauh 3.700 kilometer selama 19 menit. Jangkauan itu disebut para pengamat cukup jauh untuk mencapai Guam, wilayah Amerika Serikat (AS) di Pasifik.⁹

Prioritas utama bagi Jepang untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kemampuan pertahanan rudal balistik lebih besar integrasi dan kerja sama antara ketiganya layanan dan dengan Amerika Serikat. Modernisasi sistem *Ballistic Missile Defense* (BMD) saat ini dan memperoleh tambahan kemampuan pertahanan rudal baru untuk tetap berada di depan Ancaman juga penting. Modernisasi ini akan terjadi termasuk meningkatkan inventaris pencegat Aegis SM-3 IB, dan akhirnya ke SM-3 IIA, saat ini sedang kooperatif dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Jepang.

Jepang juga memiliki dua Aegis BMD kelas Atago baru cruiser dalam konstruksi, yang akan dilengkapi SM-3 IIA pencegat. Jepang juga mencari untuk meningkatkan lahannya arsitektur pertahanan rudal. Meskipun Jepang Patriot mewakili banyak konsentrasi senjata pertahanan misil, mereka relatif kecil daerah cakupan meninggalkan banyak bagian Jepang yang rentan. Jepang harus meningkatkan semua radar Patriot batalionnya untuk mengakomodasi Misi

⁹ Detik news, *Melintasi Jepang, Rudal Korut Mengudara 3.700 dalam 19 menit*, <https://news.detik.com>, 2017. diakses pada 15 mei 2018.

terbaru Interceptor Segment Enhancement (MSE).¹⁰

Pada tahun 2003, Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi menyatakan minatnya yang meningkat pada pertahanan rudal balistik. Hal ini menyebabkan penyebaran pertama Tokyo sistem Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) dan Aegis BMD pada tahun 2007. Baterai Patriot telah digunakan di sekitar Tokyo dan secara permanen ke Okinawa. Sistem BMD Aegis pertama kali digunakan sebagai upgrade ke Aegis KONGO Class Destroyers. Upgrade termasuk mempersenjatai perusak dengan rudal SM-3 Block IA. Tes intersepsi pertama terjadi pada JS Kongo (DDG-173) pada Desember 2007, diikuti oleh tes sistem pada JS Chokai (DDG-176), JS Myoko (DDG-175), dan JS Kirishima (DDG-174).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan negara Jepang dalam merespon ancaman misil Korea Utara dengan memperkuat pertahanan militernya, salah satunya pertahanan udara. Salah satu aspek penataan ruang udara yang berkaitan dengan pertahanan udara nasional adalah dengan menetapkan suatu zona identifikasi yang mewajibkan pesawat sipil maupun militer untuk melaporkan rencana penerbangannya, hal ini disebut *Misile Air Defense*. Karya Ilmiah ini diangkat untuk menjabarkan lebih lanjut kebijakan Jepang dalam memperkuat pertahanan militernya terhadap ancaman misil Korea Utara.

KERANGKATEORI

Level Analisa

Penelitian ini menggunakan teori neo-realisme defensif yang dimapankan

¹⁰ *Missile Defense Advocacy Alliance, Making The World A Safer Place*, <http://missiledefenseadvocacy.org>, 2018. diakses pada 11 juli 2018.

oleh Kenneth Waltz. Menurut Kenneth Waltz, sistem internasional terdiri dari sejumlah kekuatan besar, yang masing-masing berusaha untuk bertahan karena sistem berjalan secara anarkis (suatu kondisi yang dihasilkan karena tidak adanya otoritas sentral yang dapat mengaturnya). Di dalam kondisi yang anarkis seperti itu, setiap negara akan mempertahankan dirinya sendiri. Untuk itu, kata Waltz, kondisi ini telah memaksa negara-negara lemah menjadi berupaya untuk mengimbangi negara-negara yang kuat.¹¹

Konflik yang sedang dialami oleh Jepang berada dalam Dilema Keamanan atau *Security Dilemma*, digambarkan sebagai suatu keadaan dimana tindakan yang diambil oleh negara dalam rangka memperkuat pertahanan dan keamanannya seperti meningkatkan kapabilitas atau kekuatan militer ataupun membentuk sebuah aliansi dengan negara lain.

Hal tersebut menyebabkan negara-negara di sekitarnya melakukan respon. Respon tersebut dapat berupa tindakan serupa yang kemudian mampu meningkatkan ketegangan hingga memungkinkan terciptanya konflik terutama di suatu kawasan internasional.¹²

Menurut John Herz, *Security Dilemma* dalam Hubungan Internasional adalah “gagasan struktural” dimana upaya-upaya yang diambil oleh sebuah negara untuk menjaga kebutuhan keamanannya sendiri, terlepas dari apapun niatnya cenderung memicu ketidaknyamanan bagi negara lain, terutama negara di sekitarnya. Masing-masing negara yang mengambil tindakan tersebut menganggap bahwa tindakan yang diambil hanya bersifat defensif dan tindakan yang diambil oleh

¹¹ M. Yani, Yanyan, Ian Montratama & Emil Mahyudin, *Pengantar Studi Keamanan*, Malang: Intrans Publishing, 2017.

¹² La Ode, *Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok*, 8

negara lain bersifat mengancam.¹³

Dalam konflik ini Jepang sedang mengalami dilema keamanan, dimana Jepang di hadapkan dengan keamanan negaranya yang berasal dari misil Korea Utara yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara Jepang yaitu Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang diarahkan ke wilayah Jepang yang melintasi laut Jepang. Hal tersebut yang membuat Jepang merespon ancaman tersebut dengan peningkatan kapabilitas militer demi keamanan negaranya.

PEMBAHASAN INTENSITAS PERTAHANAN KOREA UTARA

Pada tahun 2011, pemerintahan Kim Jong Il digantikan oleh anaknya, Kim Jong Un. Sejak awal menjabat sebagai pemimpin Korea Utara, banyak pihak yang meragukan Kim Jong Un. Hal ini dikarenakan pengangkatan Jong Un terlalu cepat, sementara ia belum memiliki pengalaman dalam memimpin negara. Sadar akan hal ini, kemudian Kim Jong Un lebih memilih untuk mengunci diri menjadi jenderal tertinggi angkatan bersenjata dibandingkan menjadi pemimpin partai buruh atau ketua komisi pertahanan nasional. Karena dengan memimpin angkatan militer, Kim Jong Un bisa memegang kontrol penuh terhadap kebijakan “*military first*” yang dicanangkan oleh mendiang ayahnya.¹⁴

Era Kim Jong Un menandai sebuah era baru dalam program riset dan

pengembangan senjata nuklir serta rudal balistik Korea. Sejak awal memimpin, Jong Un menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan signifikan dalam hal pencapaian level teknologi dan kapasitas industri dalam memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan program rudal balistik. Berbeda dari pemimpin sebelumnya, Kim Jong Un mencanangkan kebijakan baru yang dinamai kebijakan *Byungjin*. Kebijakan ini adalah kebijakan yang menitik beratkan kepada sektor program nuklir dan rudal balistik sebagai prioritas utama dalam usaha sinergi pembangunan antara sektor ekonomi dan sector militer. Dalam pelaksanaannya program nuklir dan rudal balistik mendapat prioritas tertinggi dalam segi alokasi negara diatas sektor militer.

Selain itu, pemimpin Korea Utara ke tiga ini juga melakukan reformasi ekonomi internal, yang tujuannya adalah untuk membuat Korea Utara lebih mandiri dan menurunkan ketergantungannya terhadap bantuan luar negeri. Seperti yang diketahui, masalah ekonomi dan pangan merupakan permasalahan yang begitu lama yang menghantui Korea Utara dan belum terselesaikan hingga saat ini. Kim Jong Un juga menginstruksikan bahwa Korea Utara harus meningkatkan produksi hulu ledak nuklir yang lebih kecil untuk dapat dimuat dalam rudal balistik, meningkatkan produksi dan kapasitas rudal balistik, dan berusaha untuk mengembangkan teknologi nuklir agar dapat membuat senjata yang lebih canggih dan mematikan. Kim juga mengisyaratkan bahwa rudal balistik antar benua atau *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) dengan hulu ledak nuklir akan menjadi senjata utama di Korea Utara.

Sejak awal kepemimpinannya, Kim Jong Un telah beberapa kali melakukan uji coba senjata masal ini. Pada bulan Februari 2013, Kim Jong Un melakukan uji coba senjata nuklir untuk pertama kalinya. Tiga

¹³ Roe, P.(1999).*The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a Tragedy?* dalam La Ode, “Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang – Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok”Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin(2017): 9

¹⁴ S.H.Cho, *Kim Jong-un Named Leader of North Korean Army*, The New York Times, 11 Desember 2019, P. A9.

tahun kemudian pada bulan Januari Kim Jong Un kembali melakukan uji coba peluncuran bom hidrogen. Bulan September ditahun yang sama, Korea Utara kembali melakukan uji coba, kekuatan getaran yang dirasakan mencapai 5,3SR. Pada bulan September 2017, Korea Utara juga melakukan uji coba senjata nuklir yang menyebabkan kejadian gempa hingga 6,3SR yang diukur oleh survei geologi milik Amerika Serikat. Pyongyang mengklaim bahwa perangkat tersebut merupakan bom hidrogen yang bisa dipasang di rudal antar benua. Dan yang terakhir, Korea Utara melakukan penembakan rudal balistiknya yang melintasi wilayah udara kedaulatan Jepang di bagian Timur, yaitu pulau Hokkaido.

PERKEMBANGAN PERTAHANAN MILITER JEPANG PADA TAHUN 2012-2017.

Peningkatan Kapabilitas militer Jepang

Kapabilitas militer adalah kemampuan dari kekuatan militer suatu negara yang dapat digunakan untuk melakukan serangkaian operasi untuk mengejar kepentingan negara yang bersangkutan ataupun menghadapi ancaman musuh. Peningkatan kapabilitas militer suatu negara inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dan melihat sejauh mana suatu negara melakukan peningkatan kekuatan militernya.

Dalam mengukur kapabilitas militer suatu negara, menurut Stephen Biddle dalam bukunya *Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle* (2004) dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan melihat jumlah kekuatan militer dan indikator teknologi militer. Oleh karena itu, dalam sub bab ini penulis akan memaparkan peningkatan kapabilitas militer Jepang melalui dua cara tersebut.

1. Kekuatan Militer

Meskipun Jepang tidak memiliki

angkatan bersenjata seperti negara lain pada umumnya namun Jepang memiliki pasukan bela diri yang khusus yang siap sedia dan selalu siaga dalam menjaga keamanan Jepang dan membela kepentingan Jepang. Dalam melihat peningkatan kapabilitas militer Jepang, pasukan bela diri Jepang tersebut dapat dijadikan indikator untuk mengukur peningkatan kapabilitas militernya. Hal tersebut tidak terlepas dari JSDF Jepang memiliki peranan yang sangat penting dalam menyokong perkembangan pertahanan dan keamanan Jepang.

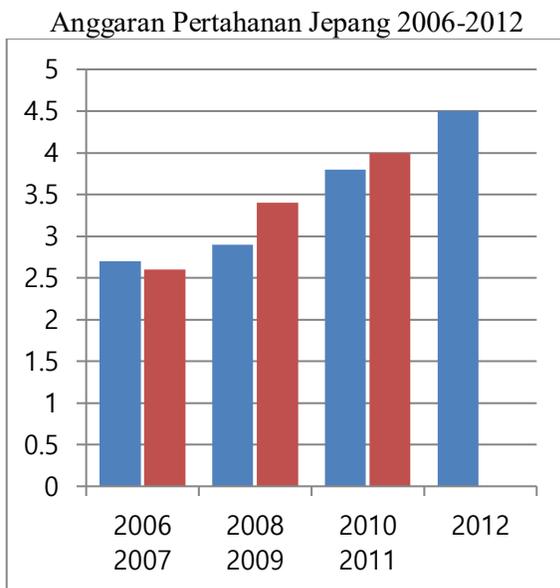
Pasukan bela diri Jepang atau disebut dengan *Japan Self Defense Force* (JSDF) terbagi ke dalam tiga cabang kekuatan yaitu, Kekuatan Bela Diri Darat (*The Japan Ground Self-Defense Force*), Kekuatan Bela Diri Laut (*The Japan Maritime Self-Defense Force*) dan Kekuatan bela diri udara (*The Japan Air Self-Defense Force*). Jumlah keseluruhan personel aktif Jepang pada tahun 2016 adalah sekitar 250.000 dan jumlah pasukan cadangan yang berjumlah sekitar 57.900 pesonil. Salin itu tiap-tiap pasukan bela diri Jepang baik darat, laut, maupun udara dilengkapi dengan alat utama sistem pertahanan yang canggih.

Hal tersebut menjadikan Jepang masuk ke dalam posisi 24 dengan kekuatan bersenjata terbesar di dunia dan dengan belanja militer tahunan lebih dari 50 miliar USD menempatkan Jepang di peringkat ke 7 dalam hal belanja militer. Meskipun jumlah JSDF ini mengalami pasang surut dan cenderung mengalami penurunan namun jumlah yang berkurang tersebut membuat pasukan beladiri Jepang sekarang menjadi lebih efisien dan efektif bagi pergerakan misi JSDF. Jika sebelumnya misi JSDF hanya untuk menjaga keamanan internal Jepang kini misinya mengalami perluasan di antaranya terlibat *Peace Keeping Operation* dibawah PBB dan penjagaan diwilayah laut di pulau Guam, Amerika Serikat dan pulau Diego

Garcia, Inggris.¹⁵

Selain misi JSDF yang mengalami perluasan, anggaran pertahanan Jepang mengalami perkembangan dan peningkatan yang dibuktikan dengan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Anggaran pertahanan merupakan salah satu penting dalam melihat perkembangan militer suatu negara karena besar kecilnya anggaran militer merupakan alat ukur bagi belanja militer suatu negara. Berikut grafik yang menunjukkan peningkatan anggaran militer Jepang dari tahun 2006-2012.

Grafik 1



Sumber: Diolah dari data resmi Kementerian Pertahanan Jepang (diukur dalam miliar USD).

Dari tabel diatas, walaupun sempat mengalami penurunan anggaran pertahanan pada tahun 2007 namun secara keseluruhan dari tahun 2006-2012 Jepang terus menunjukkan angka anggaran militer Jepang bergerak naik. Meski Jepang dibatasi dengan ketentuan yang menyatakan bahwa anggaran pertahanan militer Jepang tidak diperkenankan melebihi dari jumlah 1% dari GDP. Namun

¹⁵ *The Self Defence Force* diakses melalui <http://www.unmissablejapan.com/etcetera/self-defence-force> pada tanggal 14 Juli 2019.

pembatasan anggaran militer Jepang tersebut tidak otomatis menjadikan Jepang memiliki anggaran militer yang lebih rendah dari negara lain yang memiliki jumlah persentase anggaran militer yang lebih besar dari GNP. Meskipun hanya menetapkan angka 1% dari total GNP untuk pendanaan militernya namun dengan kemampuan ekonomi yang besar seperti yang dimiliki Jepang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan kekuatan militer.

2. Teknologi Militer

Selanjutnya hal yang dapat dijadikan indikator dalam melihat peningkatan kapabilitas militer Jepang adalah teknologi militer yang dimilikinya. Dalam bidang teknologi pertahanan, Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki teknologi pertahanan yang maju. Berikut penulis memaparkan beberapa kemajuan teknologi militer yang dimiliki oleh Jepang :

Tabel.1

Tekhnologi Militer Jepang 2006-2012

Nama	Jenis	Tahun
<i>Control Missile Type-99</i>	Misil Pengendali	2006
<i>Air-to-air Missile Type-03</i>	Pertahanan Misil	2006
<i>Chu-SAM</i>		
<i>Radar FBX-T</i>	Radar Pertahanan	2007
<i>SH-60J Helicopter</i>	Helikopter Anti	2007
<i>SM-3 Missile</i>	Panangkal misil	2007
<i>AH-64D Longbow Apache</i>	Helikopter tempur	2007
<i>MBT-X Type 10</i>	Tank Tempur	2008
<i>16DDH/ Hyuga</i>	KapalInduk Pengangkut (<i>Aircraft Carrier</i>)	2009
<i>P-3C iron</i>	Pesawat Pengintai	2010
<i>Submarine ASW Hunter</i>	Kapal Selam	2010
<i>F-35 Lightning II</i>	Jet Tempur	2011
<i>C4ISR</i>	Sistem Tekhnologi	2012
<i>ATD-X Shinsin</i>	Jet Tempur	2012

Sumber: Diolah dari website resmi Kementerian Pertahanan Jepang www.mod.go.jp dan www.globalsecurity.org/military/world/japan dalam

Ahmad Despuriansyah, “*Kepentingan Amerika Serikat Dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pertahanan Dan Keamanan Jepang Periode 2006-2012.*”

3. Peningkatan *Japan Missile Air Defence* pada tahun 2013

Anggaran pada tahun 2013 menetapkan peningkatan jumlah pegawai SDF dengan total 287 untuk memastikan respon yang efektif terhadap berbagai kemungkinan dan meningkatkan kesiapan. Hal itu menetapkan bahwa upaya harus dilakukan untuk memastikan meningkatkan kesiapan unit mengenai pengumpulan informasi, peringatan dan pengawasan, dan memastikan keamanan di wilayah barat daya. Selain itu, menetapkan bahwa upaya harus dibuat untuk meningkatkan ketersediaan operasional peralatan dengan mengamankan dana yang memadai untuk menutupi biaya perawatan dan perbaikan.

4. Peningkatan *Japan Missile Air Defence* pada tahun 2014

4.1. Pastikan keamanan laut dan wilayah udara di sekitar Jepang

Memperoleh pesawat patroli sayap tetap (P-1), membangun kapal perusak dan kapal selam, membangun kapal penyelamat multiguna untuk pengiriman bencana, meninjau pengenalan pesawat peringatan dini udara baru (kontrol) pesawat terbang dan kendaraan udara tak berawak dengan durasi lama, dll.

4.2. Menanggapi serangan di pulau-pulau terpencil

Menyebarkan unit pengamatan pantai di Pulau Yonaguni, mengatur kembali ASDF Airborne Early Warning Group, memperoleh pejuang (F-35A), meninjau pengenalan pesawat rotor miring, mempromosikan kebijakan terkait pemanfaatan kapasitas transportasi sektor swasta, mengembangkan kemampuan amfibi (baru membangun dan unit amfibi, mengembangkan infrastruktur pelatihan dan pendidikan, membeli barang referensi untuk kendaraan amfibi, dan meningkatkan

kinerja operasi kapal amfibi, dll.), dan mengintegrasikan komando luar ruang Jepang-AS dan sistem telekomunikasi, dll.

4.3. Menanggapi serangan rudal balistik

Menyebarkan unit PAC-3 di Ichigaya, mengonversi radar kendali peringatan tetap (FPS-7) dan menambahkan fungsi untuk respons BMD, melakukan survei dan penelitian tentang sistem pertahanan rudal balistik di masa depan, dll.

5. Peningkatan *Japan Missile Air Defence* pada tahun 2015.

5.1 Pastikan keamanan laut dan wilayah udara di sekitar Jepang

Memperoleh pesawat patroli sayap tetap (P-1), memperoleh helikopter patroli (SH-60K), membangun kapal selam, memperoleh pesawat peringatan dini udara (E-2D) baru dan memperoleh bagian dari sistem Kendaraan Udara Tak Berawak (Global Hawk), dll.

5.2 Menanggapi serangan di pulau-pulau terpencil

Menyebarkan unit pengamatan pantai untuk mencakup Pulau Yonaguni, memperoleh pesawat tempur (F-35A), yang baru mendirikan Sayap Udara ke-9 karena dua skuadron ditambahkan ke unit pesawat tempur di Pangkalan Udara Naha, melakukan studi terhadap pembangunan kapal perusak baru, mengakuisisi V-22 Osprey, mengakuisisi kendaraan amfibi (AAV7), memutakhirkan LST kelas Osumi untuk meningkatkan kemampuan transpornya dalam operasi amfibi, melakukan penelitian untuk membahas tujuan kapal multi-fungsi, mempromosikan inisiatif seperti program PFI dengan sehubungan dengan penggunaan transportasi laut sektor swasta, dll.

5.3 Menanggapi serangan rudal balistik

Bangun sebuah kapal perusak yang dilengkapi dengan helikopter, lakukan

pengembangan kooperatif rudal balistik canggih Jepang-AS (SM-3 Blok IIA), resertifikasi ulang rudal PAC-3, kembangkan infrastruktur untuk penyebaran unit PAC-3 di Ichigaya dan dalam merespon di luar angkasa, Studi tentang spesifikasi kemampuan sistem Space Surveillance, penelitian empiris pada teknologi sensor inframerah dual-panjang gelombang di luar angkasa, memanfaatkan Advanced Land Observing Satellite-2 "DAICHI-2" (ALOS-2), dll.

5.4 Menanggapi bencana skala besar

Mempertahankan dan memperkuat fungsi kamp dan pangkalan yang akan berfungsi sebagai hub selama bencana, melakukan pelatihan bencana skala besar dan khusus, meningkatkan fungsi alternatif jika bangunan Ichigaya menjadi rusak karena bencana, memperoleh mesin konstruksi lengan ganda dan dalam memperkuat kemampuan intelijen, Jepang Meningkatkan kemampuan pengumpulan HUMINT, meningkatkan kemampuan penelitian dalam kaitannya dengan pengumpulan informasi publik melalui analisis data besar, memperkuat sistem yang terkait dengan Atase Pertahanan, dll.¹⁶

6. Peningkatan *Japan Missile Air Defence* pada tahun 2016.

6.1 Pastikan keamanan laut dan wilayah udara di sekitar Jepang

Memperoleh helikopter patroli (SH-60K), membangun kapal selam, membeli pesawat peringatan dini udara (E-2D) baru, memperoleh bagian dari sistem Kendaraan Udara Tak Berawak (Global Hawk), dll.

6.2 Menanggapi serangan rudal balistik

Bangun perusak yang dilengkapi Aegis, lakukan pengembangan kooperatif rudal balistik canggih Jepang-AS (SM-3 Block IIA), resertifikasi ulang rudal PAC-3, kembangkan infrastruktur untuk penyebaran unit PAC-3 di Ichigaya, dan dalam merespons di luar angkasa Jepang merancang sistem untuk Sistem Pengawasan Luar Angkasa secara keseluruhan, dll.

6.3 Menanggapi bencana skala besar

Menjaga dan memperkuat fungsi kamp dan pangkalan yang akan berfungsi sebagai hub selama bencana, melakukan pelatihan bencana skala besar dan khusus, meningkatkan fungsi alternatif jika bangunan Ichigaya rusak akibat bencana dan memperkuat kemampuan intelijen dengan memperkuat sistem manajemen Atase Pertahanan, dll.¹⁷

7. Peningkatan *Japan Missile Air Defence* pada tahun 2017.

7.1 Menjamin keamanan laut dan udara di wilayah Jepang, dengan melakukan :

1. Memperoleh pesawat udara tak berawak (Global Hawk)
2. Membangun kapal selam.
3. Membangun kapal anti ranjau
4. Membangun kapal penelitian akustik

KEBIJAKAN JEPANG DALAM MERESPON ANCAMAN MISIL KOREA UTARA.

Di bawah Kebijakan Dasar untuk Pertahanan Nasional, Jepang telah membangun kemampuan pertahanan yang

¹⁶ *Building a Dynamic Joint Defense Force, "Build-Up of Defense Capability in FY2015"* (2015): hal-245: https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2015/DOJ2015_3-1-2_web.pdf (17 Juli 2019)

¹⁷ *Building a Dynamic Joint Defense Force, "Build-Up of Defense Capability in FY2016"* (2016): hal-189: https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2016/DOJ2016_2-2-3_web.pdf (20 Juli 2019)

sederhana di bawah Konstitusi untuk tujuan-tujuan yang berorientasi pertahanan secara eksklusif tanpa menjadi kekuatan militer yang dapat mengancam negara-negara lain, sambil tetap berpegang pada prinsip kontrol sipil atas militer, mengamati Tiga Prinsip Non-Nuklir, dan dengan kuat mempertahankan Jepang-AS Pengaturan Keamanan

1. Kebijakan Khusus Pertahanan-Berorientasi

Kebijakan berorientasi pertahanan eksklusif berarti bahwa Jepang tidak akan menggunakan kekuatan pertahanan kecuali dan sampai serangan bersenjata dilakukan di Jepang oleh negara lain, dan bahkan dalam kasus seperti itu, hanya kekuatan minimum yang diperlukan untuk mempertahankan diri dapat digunakan. Selain itu, hanya kekuatan pertahanan minimum yang diperlukan untuk pertahanan diri yang harus dipertahankan dan digunakan. Kebijakan yang berorientasi eksklusif pertahanan ini adalah strategi pertahanan pasif yang konsisten dengan semangat Konstitusi.

2. Tidak Menjadi Kekuatan Militer

Tidak ada definisi yang ditetapkan untuk istilah "kekuatan militer". Namun bagi Jepang, tidak menjadi kekuatan militer yang bisa mengancam keamanan negara lain berarti bahwa Jepang tidak akan melakukannya memiliki lebih banyak kekuatan militer daripada yang diperlukan untuk pertahanan diri dan itu bisa menimbulkan ancaman bagi negara lain.

3. Tiga Prinsip Non-Nuklir

Tiga Prinsip Non-Nuklir adalah bahwa Jepang: tidak akan memiliki senjata nuklir, tidak akan menghasilkan senjata nuklir, dan tidak akan mengizinkan senjata nuklir masuk ke Jepang. Jepang mematuhi Tiga Prinsip Non-Nuklir sebagai kebijakan nasional tetap. Jepang dilarang membuat atau memiliki senjata nuklir juga di bawah

Undang-Undang Dasar Energi Atom. Selain itu, Jepang meratifikasi Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), dan sebagai negara senjata non-nuklir, tidak diizinkan untuk memproduksi atau mendapatkan senjata nuklir.

4. Mengamankan Kontrol Sipil

Kontrol sipil terhadap militer berarti subordinasi militer terhadap kontrol politik di negara demokratis, atau dengan kata lain, kontrol atas militer oleh otoritas politik yang demokratis. Belajar pelajaran dari Perang Dunia II, Jepang telah mengadopsi sistem kontrol sipil ketat berikut yang sama sekali berbeda dari yang ada di bawah Konstitusi sebelumnya. Kontrol sipil memastikan bahwa SDF dipertahankan dan dioperasikan sesuai dengan kehendak rakyat. Diet, yang mewakili masyarakat Jepang, memutuskan undang-undang dan anggaran termasuk jumlah jatah personil SDF yang berseragam dan lembaga-lembaga utama MOD / SDF. Ini juga menyetujui penerbitan Perintah Operasi Pertahanan.

Fungsi pertahanan nasional sepenuhnya berada di bawah kekuasaan eksekutif Kabinet sebagai bagian dari fungsi administrasi umum. Konstitusi mengharuskan Perdana Menteri dan Menteri Negara lainnya di Kabinet menjadi warga sipil. Di bawah Konstitusi, Perdana Menteri, atas nama seluruh Kabinet, adalah panglima tertinggi SDF. Menteri Pertahanan, yang secara eksklusif bertanggung jawab atas pertahanan nasional, melakukan kontrol umum atas kegiatan SDF. Selain itu, Dewan Keamanan Jepang di bawah Kabinet membahas hal-hal penting tentang pertahanan nasional.

Adapun Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan bertanggung jawab atas urusan administrasi mengenai pertahanan nasional, dan mengendalikan dan mengelola SDF. Menteri Pertahanan dibantu dalam kebijakan perencanaan oleh Wakil Menteri

Senior dan dua Sekretaris Parlemen. Selain itu, penasihat khusus untuk Menteri Pertahanan memberi nasihat kepada Menteri Pertahanan tentang masalah-masalah penting di bawah yurisdiksi Kementerian Pertahanan berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka. Dewan Pertahanan yang terdiri dari orang-orang yang ditunjuk secara politis, pegawai negeri sipil dan personil SDF berseragam dari Kementerian Pertahanan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar di bawah yurisdiksi Kementerian. Melalui cara-cara ini, Kementerian Pertahanan bertujuan untuk lebih meningkatkan sistem kontrol sipil.

Seperti disebutkan di atas, sistem kontrol sipil dibangun dengan baik. Sangatlah penting bahwa orang Jepang memiliki minat yang mendalam pada pertahanan nasional dan kita membutuhkan upaya politis dan administratif untuk memastikan fungsi kontrol sipil secara efektif.

5. Pencegahan dan Respons yang Efektif

Bagian ini menjelaskan sistem untuk melindungi kehidupan dan harta benda warga negara serta mempertahankan tanah, perairan, dan ruang udara teritorial Jepang dengan merujuk pada contoh-contoh tanggapan yang diberikan oleh SDF dalam berbagai kemungkinan di bawah postur operasi bersama.

6. Memastikan Keamanan Laut dan Wilayah Udara Di Sekitar Jepang

Agar SDF merespon dengan cepat berbagai kemungkinan di sekitar Jepang, yang terdiri dari lebih dari 6.000 pulau dan dikelilingi oleh perairan yang luas, sangat penting untuk memastikan keamanan perairan teritorial negara dan wilayah udara melalui konstan, berkelanjutan kegiatan yang dilaksanakan oleh SDF, termasuk pengumpulan-intelijen terus-menerus,

kegiatan patroli dan pengawasan di perairan dan wilayah udara Jepang. Melalui kegiatan seperti itu, Jepang juga berkontribusi pada stabilisasi lingkungan keamanan di kawasan Asia-Pasifik.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menetapkan konsep dalam penelitian ini ialah *Security Dilemma* yaitu, Jepang sedang menghadapi dilema keamanan terhadap ancaman misil Korea Utara. Dalam *Security Dilemma*, peningkatan tingkat keamanan di suatu negara menurunkan tingkat keamanan pada negara lainnya dan memungkinkan terjadinya sebuah perlombaan senjata (*Arm Race*).

Dalam hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Jepang merespon ancaman misil dari Korea Utara pada tahun 2012-2017 ialah membuat kebijakan dalam memperkuat pertahanan militernya, dengan meningkatkan *Missile Air Defense*. Mengharuskan Jepang memiliki keamanan yang kuat untuk dapat mencapai kesejahteraan dan dapat melakukan aktivitas normal sebagai negara.

Kebijakan dasar yang harus dilakukan oleh Jepang ialah dengan mendukung kegiatan PBB, membangun fondasi yang perlukan untuk memastikan kualitas hidup yang stabil, secara progresif mengembangkan kemampuan pertahanan yang efisien dan menangani invasi asing ke Jepang. Dan pada tahun 2012-2017 Jepang telah meningkatkan persenjataan militernya salah satunya, Jepang dapat menjamin keamanan laut dan udara diwilayah Jepang dengan memperoleh pesawat udara tak berawak (*Global Hawk*) dan pada tahun 2014 telah memiliki alat untuk menanggapi serangan rudal balistik yaitu, PAC-3 di Ichigaya.

Dengan berjalannya waktu negara

¹⁸*Ibid.*

tetangga Jepang yaitu Korea utara terus memperbaharui kualitas senjatanya salah satunya yaitu nuklir, yang diuji coba sehingga melintasi daerah teritorial Jepang itulah membuat ancaman yang sangat mendalam bagi Jepang. Ancaman yang terus dirasakan oleh Jepang sangat membuat kegelisahan tersendiri, yang mengharuskan Jepang memperkuat dan meningkatkan keamanannya.

Peningkatan senjata Jepang dalam penulisan ini di ambil dari tahun 2012-2017. Dimana pada tahun tersebut Jepang sadar bahwa kekuatan sebuah negara bukan saja berasal dari kuatnya ekonomi. Namun, dalam mempertahankan sebuah negara Jepang juga harus memikirkan kekuatan keamanan dan memperhatikan peningkatan kualitas senjata militer miliknya untuk dapat melindungi maupun bersaing dengan negara-negara tetangganya.

Daftar pustaka

Buku :

- Abeyratne, Ruwantissa, *In Search Of Theoretical Justification For Air Defense Identification Zones*, 2011 Springer Science+Business Media, LLC.
- Ambarwati, et.al, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, 2010. Rajawali Pers, Jakarta.
- Anak, Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Buzan, Barry, *People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*. 2nd ed. London: Harvester Wheatsheaf, 1991.
- Charter Of The United Nations And Statute Of The International Court Of Justice* (San Francisco, 1945).
- Hendarsah. A, *11 Macam Asia Musuh Amerika*, Yogyakarta : Galangpress,

2007.

Hook, Glenn D, Julie Gilson, dkk, *Japan's International Relation: Politics, Economics and Security*. 2001, London: Routledge.

Jackson, Robert & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations*, 1999 (New York: Oxford University Press).

Jemadu, Aleksius, "Politik Global dalam Teori dan Praktik", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

M. Yani, Yanyan, Ian Montratama & Emil Mahyudin, *Pengantar Studi Keamanan*, Malang: Intrans Publishing, 2017.

Mas'oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990.

Sardiman, *Sejarah 3 SMA Kelas XII Program Ilmu Alam*, 2008, Quadra.

Seung-Yoon, Yang & Nur Aini Setiawati, *Sejarah Korea Sejak Awal Abad hingga Masa Kontemporer*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. 2003.

Surbakti, Ramlan, *Metodologi Ilmu Politik*, (Surabaya:FISIP-UNAIR Press, 1987).

Waltz, Kenneth, *Theory of International Politics*, 1979 (New York: McGraw Hill).

Jurnal :

An Argument for Japan's Becoming Permanent Member diakses melalui http://www.mofa.go.jp/policy/q_a/fa/q5.html pada tanggal 15 Juli 2019

Building a Dynamic Joint Defense Force, "Build-Up of Defense Capability in FY2014" (2014):

https://www.mod.go.jp/e/publ/w_pa

- [per/pdf/2014/DOJ2014_2-5-3_web_1031.pdf](#) (17 Juli 2019)
- Building a Dynamic Joint Defense Force, "Build-Up of Defense Capability in FY2015"* (2015):
https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2015/DOJ2015_3-1-2_web.pdf (17 Juli 2019)
- Building a Dynamic Joint Defense Force, "Build-Up of Defense Capability in FY2016"* (2016):
https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2016/DOJ2016_2-2-3_web.pdf (20 Juli 2019)
- Building a Dynamic Joint Defense Force, "Build-Up of Defense Capability in FY2017"* (2017):
https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2017/DOJ2017_2-2-3_web.pdf (20 Juli 2019)
- Darmono, dkk. *Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*, 2010. Jakarta : Dewan Ketahanan Nasional.
- Gabriel Almodovar, Daniel P. Allmacher, Morgan P, and Chad Davies. *Joint Integrated Air and Missile Defense: Simplifying an Increasingly Complex Problem*, 2010. <http://ndupress.ndu.edu/Publications/Article/1412812/joint-integrated-air-and-missile-defense-simplifying-an-increasingly-complex-pr/>
- Handayani, Rossy. *Transformasi Pertahanan Jepang Pasca Perang Dingin (1991-2007)*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2008
- Nanto, Dick, K and Emma Chanlett-Avery. *The Rise of China and It's Effect on Taiwan, Japan and South Korea : U.S. Policy Choices*, 2006. Congressional Research Service, The Library Congres.
- Kingston, Jeff. *Contemporary Japan: History, Politic, and Social Change Since the 1980s* (West Sussex: Willey-Blackwell, 2011).
- Lillahi, R. *Postur Pertahanan Jepang Pasca Pembentukan Kementerian Pertahanan (2007-2013)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2014.
- Lubis, Khairunnisa J. *Motivasi Tiongkok Mendirikan Air Defense Identification Zone (ADIZ) di Wilayah Laut Cina Timur*, 2015. Volume 2 No. 1. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/4768/4651>
- Mustika Putro, Epica. *"Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang"*(2012), Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nishihara, Masashi. *"Japan's Gradual Defense Build up and Korean Security"*, *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol.1, No. 1, 1998.
- Olivia, Yessi. *Level Analisis Sistem dan teori Hubungan Internasional*. Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1, Juli 2013.
- Sastrowiranu, Mulyanto dan Rosy Handayani, 2007. *Upaya Jepang Mengatasi Peningkatan Peran China Di Kawasan Asia Timur: Studi Kasus East Asia Summit 2005*. Jakarta: Universitas Indonesia
- The National Defense Program Guidelines and the Build-Up of Defense Capability, "Build-Up of Defense*

- Capability in FY2013*” (2013): hal-115:
https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2013/27_Part2_Chapter2_Sec3.pdf (15 Juli 2019)
- Zolotukhina, Elizabeth. *Ballistic Missile Defense : New Plans, Old Challenges*, 2010. Volume3No.2. <https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.id/&httpsredir=1&article=1011&context=jss>
- Website :**
- Defense of Japan* 2011 diakses melalui http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2011.html pada tanggal 13 Juni 2019.
- Detik news, 2017, Melintasi Jepang, Rudal Korut Mengudara 3.700 dalam 19 menit, <https://news.detik.com>, diakses pada 15 mei 2018.
- Establishment of Facility for counter-piracy mission in Djibouti* diakses melalui <http://www.mod.go.jp/e/jdf/no23/topics01.html> pada tanggal 14 Juni 2019.
- Feng Zhang, "Should Beijing Establish an Air Defense Identification Zone Over the South China Sea?", <http://foreignpolicy.com/2015/06/04/should-beijing-establish-an-air-defense-identificationzone-over-the-south-china-sea/>;
- Jordy C. Virya, *Kronologi Konflik Korea Selatan dan Korea Utara*, https://www.academia.edu/11228745/Kronologi_Konflik_Korea_Selatan_dan_Korea_Utara, diakses pada 20 maret 2018.
- KBS World Radio, *Rudal Balistik Antar Benua*, URL: http://world.kbs.co.co.kr/indonesian/archive/program/news_zoom.html.
 Diakses tanggal 11 juli 2018.
- Missile Defense Advocacy Alliance, 2018, *Making The World A Safer Place*, <http://missiledefenseadvocacy.org>, diakses pada 11 juli 2018.
- Missile Is Tested By North Koreans* diakses melalui <http://www.nytimes.com/1993/06/13/world/missile-is-tested-by-north-koreans.html> pada tanggal 15 Juli 2019
- News Indonesia, 2017. *Korea Utara kembali menembakkan rudal lintasi Jepang*. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-42165308>, diakses pada 20 maret 2018.
- Outline of the Basic Plan regarding Response Measures Based on the Anti-Terrorism Special Measures Law* diakses melalui http://japan.kantei.go.jp/policy/2001/anti-terrorism/1116keikakus_e.html pada tanggal 13 Juni 2019.
- UU TNI tahun 2004, pasal 1, ayat 24.
- Sindo News, 2017, Jepang Setuju Beli dan Sebar Sistem Anti-Rudal Aegis AS. <https://international.sindonews.com>, diakses 13 november 2018.
- The Anti-Terrorism Special Measures Law* Diakses melalui http://japan.kantei.go.jp/policy/2001/antiterrorism/1029terohougaiyou_e.html pada tanggal 13 Juni 2019.
- The Self Defence Force* diakses melalui <http://www.unmissablejapan.com/etc/etera/self-defence-force> pada tanggal 14 Juli 2019.